

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) di SDN DAMARSI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

Intan Dwi Afiatus Sholicha

Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, M.KP

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025



# PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama dan gender. Dalam Pemerataan pendidikan merupakan prioritas nasional karena dijamin oleh UUD 1945. Negara bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi. Namun, kenyataan menunjukkan pembangunan pendidikan belum merata. Pendidikan berkualitas lebih mudah diakses oleh kalangan menengah ke atas, sementara masyarakat miskin menghadapi berbagai hambatan.

Dalam permasalahan tersebut pemerintah membuat program berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yang mengamanatkan untuk memberikan bantuan kepada anak yang berusia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai mendapatkan manfaat PIP. Program ini memberikan bantuan tunai melalui kartu (KIP) untuk biaya pendidikan yang ditujukan kepada siswa dari jenjang SD,SMP,SMA/SMK.

# PENDAHULUAN

Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan agar dapat Membantu siswa miskin memperoleh pendidikan layak, Mencegah anak putus sekolah, Memenuhi kebutuhan sekolah meskipun program ini memiliki tujuan yang baik dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti persyaratan penerima bantuan yang tidak terpenuhi dengan baik, kesalahan dalam penginputan data oleh operator, serta ketidaksinkronan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki mekanisme verifikasi dan pembenahan. persyaratan agar penerima bantuan PIP dapat lebih tepat sasaran.

Telah banyak daerah di Indonesia yang sudah mengimplementasikan Program Indonesia Pintar (PIP) ini di sekolah, salah satunya yaitu SD Negeri Damarsi Kabupaten Sidoarjo. SD Negeri Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu sekolah yang telah mengimplementasikan Program Indonesia Pintar (PIP). Sekolah ini berlokasi di Jalan Ir. Juanda, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di sekolah SD Negeri Damarsi ini juga terdapat beberapa siswa yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu.

# PENDAHULUAN

Berdasarkan data, penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Damarsi mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, ada 51 siswa yang menerima bantuan. Selanjutnya, Pada tahun 2022, jumlah penerima menurun signifikan menjadi 22 siswa yang menerima bantuan. Penurunan terbanyak terjadi Pada tahun 2023, dengan hanya 18 siswa yang menerima bantuan. Penyebab terjadinya penurunan penerimaan bantuan PIP yaitu ketatnya dalam penyeleksian data.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, penggunaan dana PIP kurang tepat. Kedua, Kurangnya sosialisai mengenai tujuan dan prosedur program ini menyebabkan minimnya pemahaman di kalangan orang tua dan siswa penerima bantuan. Ketiga, kurangnya pengawasan kepada siswa yang menerima bantuan PIP.

## TEORI PENELITIAN

Dalam penelitian implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) karena teori fokus pada masalah kebijakan publik sesuai dengan topik "Penelitian Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Damarsi", teori **Edward III (1980)** ini menyediakan kerangka konseptual yang jelas untuk menganalisis proses implementasi serta dapat pengembangan dari teori implementasi sebelumnya

# PENELITIAN TERDAHULU

1. Ahmad Baihaqi (2023) Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsN 3 HSU Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara" Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian penulis di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 3 HSU Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsN 3 HSU Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal karena dilihat dari beberapa aspek dan indikator yang belum efektif dan efisien
2. Mauliana Sari (2021) Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP MTsN 1 Watampone adalah siswa yang memiliki kartu KIP sebanyak 165 siswa. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak sekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata.
3. Bobby Rahman & Romi Asmara (2020) Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Tingkat Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada siswa sangat bermanfaat, meskipun hanya sebesar Rp.450.000,- namun dapat meringankan beban orang tua yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Program Indonesia Pintar diharapkan dapat berkelanjutan sehingga siswa dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun kendala yang dihadapi adalah pengawasan dari pemerintah daerah (stakeholder) belum berjalan efektif.

# METODE PENELITIAN



## Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.



## Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri Damarsi yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Daman marsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo



## Sumber Data

- Data primer
- Data Sekunder



## Fokus Penelitian

Penelitian diukur berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang terdapat 4 indicator diantaranya yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi



## Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan peneliti menggunakan purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data. Informan yang ditunjuk yaitu kepala sekolah, guru pendamping PIP



## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan. oleh peneliti yakni secara observasi, wawancara dan dokumentasi



## Teknik Analisis Data

(Miles & Huberman):

- Pengumpulan Data
- Reduksi Data
- Penyajian Data
- Penarikan Kesimpulan



# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Komunikasi

Indikator ini mencakup penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Damarsi telah berlangsung pada tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020, yang mengatur mekanisme pelaksanaan PIP guna memastikan pemahaman yang jelas bagi seluruh pihak terkait. Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, telah dimulai dengan baik pada tahap awal. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Sidoarjo berjalan baik pada tahap awal melalui rapat, namun tidak ada sosialisasi lanjutan setelah itu. Hal ini menyebabkan pemahaman terbatas di kalangan penerima manfaat seperti siswa dan wali murid mengenai cara kerja dan mekanisme program tersebut. Komunikasi yang kurang maksimal menghambat mereka dalam memahami prosedur yang benar. Diperlukan sosialisasi berkelanjutan agar informasi tentang PIP dapat dipahami dengan lebih memastikan tujuan program tercapai secara maksimal.

*“Tidak ada rapat atau sosialisasi khusus terkait penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP). Informasi mengenai penerimaan program ini disampaikan oleh walikelas bahwa anak saya termasuk dalam daftar penerima bantuan PIP melalui via whatsapp. Setelah itu, saya dipanggil oleh pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut bahwa anak saya mendapatkan bantuan PIP. (Wawancara 15 Januari 2025).”*

**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar



Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan implementasi komunikasi dalam penyampaian informasi PIP di SDN Damarsi masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori implementasi Edward III (1980). Informasi mengenai penerima bantuan sudah disampaikan melalui wali kelas dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman yang merata di kalangan wali murid dan peserta didik mengenai prosedur pencairan dana dan belum adanya sosialisasi langsung dalam bentuk pertemuan atau rapat menyebabkan bkan sebagian orang tua kurang mendapatkan informasi yang komprehensif

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan akan menghadapi kendala. Dalam konteks PIP di SD Negeri Damarsi, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor utama agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan. Sumber daya tersebut mencakup tenaga kerja yang kompeten, dukungan anggaran yang memadai, fasilitas dan perlengkapan. yang sesuai, serta wewenang yang jelas untuk menjalankan tugas secara optimal.

**Tabel 3.** Rekapitulasi dana bantuan PIP diterima dan disalurkan SDN Damarsi

NO	Tahun	Dana Diterima	Dana Disalurkan
1	2021	22.500.000,00	22.500.000,00
2	2022	9.900.000,00	9.900.000,00
3	2023	8.100.000,00	8.100.000,00

**Sumber:** Diolah dari SDN Damarsi, 2025

SDN Damarsi telah baik dengan memastikan bahwa dana yang diterima dan disalurkan selalu ima mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Sumber dayal manusia seperti kepala sekolah, operator PIP, wali kelas, dan guru pendamping telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan data penerima akurat serta administrasi berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Bapak Ali selaku Kepala Sekolah SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo *"Menurut saya untuk sumber daya mengenai bantuan pip ini sudah cukup memadai dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan adanya kesiapan ini, sekolah dapat memastikan bahwa program PIP dapat tersalurkan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa yang membutuhkan bantuan pendidikan"*. Wawancara 15 Januari 2025)

Bapak Aris selaku operator PIP *"Untuk sumber daya sudah mumpuni dan tidak ada masalah, Mbak. Untuk program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), biasanya saya memproses pengusulan dengan melakukan entry data ke dalam sistem Dapodik"* (Wawancara 16 Januari 2025). Selanjutnya Setiap dana yang diterima diatur dan digunakan secara tepat sasaran untuk memastikan bantuan disalurkan kepada siswa yang memenuhi kriteria.

Ibu Frida selaku guru pendamping PIP: *"Kami memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima digunakan dengan tepat sasaran. Kami bekerja sama dengan operator PIP untuk memverifikasi kelayakan siswa dan memastikan dana tersebut disalurkan kepada mereka yang berhak"* (Wawancara 16 Januari 2025). Rekapitulasi dana bantuan pip diterima dan disalurkan SDN Damarsi dapat dibuktikan dengan data dibawah ini.



# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3. Disposisi

Disposisi para pelaksana kebijakan, yang mencakup sikap, nilai, serta kecenderungan mereka dalam menjalankan tugas, berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, disposisi mengacu pada sikap dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan tekad dan keseriusan. Dalam pelaksanaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan distribusi dan pengawasan yang kurang optimal. Pendistribusian bantuan di sekolah ini kurang merata beberapa siswa yang memenuhi kriteria tidak menerima bantuan sementara beberapa siswa lainnya yang seharusnya tidak berhak justru mendapatkan bantuan (Romanti et al., 2023).

Ketidakmerataan ini bisa terjadi karena adanya ketidaktepatan dalam proses seleksi penerima bantuan. Dari fenomena diatas, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980). Pelaksanaan Disposisi Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum berjalan secara optimal yang mengacu pada sikap, komitmen, serta pemahaman para pelaksana. kebijakan dalam menjalankan program berdasarkan tujuan yang telah direncanakan Dalam konteks PIP, seharusnya para pelaksana kebijakan seperti pihak sekolah dan Dinas Pendidikan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan program serta memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada siswa yang berhak menerimanya. Maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh semua pihak yang berhak.

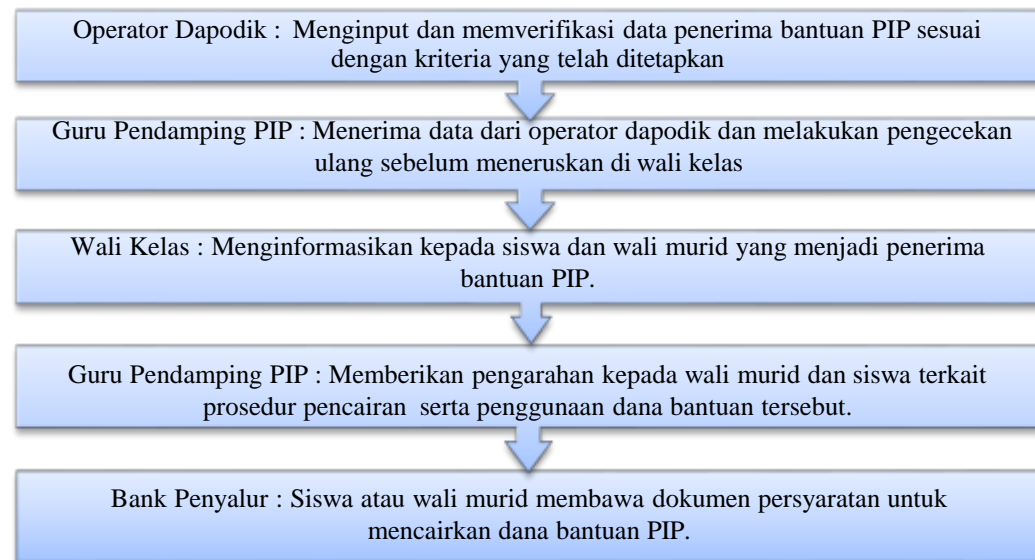
Bapak Ali selaku Kepala Sekolah sebagai berikut, *"begini mbak Pendistribusian bantuan PIP di SDN Damarsi kurang merata. Hal ini dapat kita ketahui karena mayoritas siswa di sekolah ini berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah. Pihak sekolah telah berupaya mengajukan nama-nama siswa yang membutuhkan bantuan berdasarkan kondisi ekonomi mereka. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menerima bantuan sepenuhnya berada di tangan Dinas Pendidikan yang menilai kelayakan siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelum memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Banyak siswa yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi tidak semua bisa mendapatkan karena kuota yang terbatas atau pertimbangan lain dari pihak dinas"* (Wawancara 16 Januari 2025).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo juga bergantung pada struktur birokrasi yang melibatkan koordinasi antara berbagai instansi, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat pusat hingga pelaksana di tingkat sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan sekolah. Koordinasi efektif antar instansi, seperti verifikasi data penerima bantuan dan pengawasan distribusi sangat penting agar kebijakan berjalan dengan baik. Tanpa struktur birokrasi yang jelas implementasi PIP tidak akan optimal, dan tujuan pemberian bantuan pendidikan tidak tercapai. Berikut alur pencairan bantuan PIP hingga di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo.

**Gambar 2.** Alur pencairan dana bantuan PIP.



Sumber: Hasil olah peneliti, (2025)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapak Ali selaku Kepala Sekolah SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo *"Struktur birokrasi dalam implementasi PIP sangat penting karena menentukan bagaimanamekanisme dari pendataan hingga pencairan bantuan itu berjalan. Kami di sekolah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, mulai dari mendata siswa yang berhak menerima bantuan, mengusulkannya melalui Dapodik, hingga membantu wali murid dalam proses pencairan di bank penyalur."* (Wawancara 26 Febuari 2025)

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, implementasi struktur birokrasi dalam Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sesuai dengan indikator keberhasilan menurut teori Edward III (1980). Hal ini terlihat dari alur pencairan yang terstruktur di mana setiap tahapan dalam proses pelaksanaan program memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari operator Dapodik, guru pendamping, wali kelas, hingga bank penyalur yang berjalan secara sistematis untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh siswa yang berhak

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut: Pertama, komunikasi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah dilakukan melalui berbagai cara, meliputi sosialisasi awal yang diberikan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa dan peserta didik yang menerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, beberapa wali murid masih belum memahami prosedur pencairan bantuan PIP. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih dapat ditingkatkan agar seluruh penerima manfaat memahami prosedur dengan lebih baik. Kedua, Sumber daya dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah mencukupi dari segi tenaga pelaksana dan fasilitas administrasi. Selain itu, sumber daya finansial juga telah digunakan dengan baik, di mana dana yang diterima selalu tersalurkan kepada penerima bantuan tanpa ada penyalahgunaan. Ketiga, Disposisi Dalam pelaksanaan PIP, pihak sekolah berperan dalam mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan, sedangkan keputusan akhir ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Namun, beberapa siswa yang memenuhi syarat tidak selalu terakomodasi sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses seleksi penerima sehingga diperlukan evaluasi dan koordinasi yang lebih optimal antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan agar program yang dijalankan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Keempat, Struktur birokrasi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Hanya saja, perlu adanya penguatan koordinasi dan komunikasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan orang tua, guna memastikan proses berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.

# REFERENSI

1. M. Al Amroni, M. Y. Alhadihaq, and N. Sumiati, "Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung," *Equilib. J. Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 12, no. 2, p. 158, 2023, doi: 10.35906/equili.v12i2.1521.
2. Yogatama. Muhammad Arsy, H. M. Syafingi, D. Andriantini Sintha Dewi, and D. Trisna Noviasari, "Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang," *Borobudur Law Soc. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 9–15, 2024
3. V. Septiandika, "Evaluasi Implementasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Siswa Kurang Mampu," *J. Pedagog.*, vol. 4, no. 1, pp. 52–56, 2017.
4. F. Mulyaningrum, H. P. Pawestri, and Z. Zainudin, "Evaluasi Unsur Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMPN 1 Maospati Kabupaten Magetan," *AKSIOMA J. Sains Ekon. dan Edukasi*, vol. 1, no. 6, pp. 276–286, 2024, doi: 10.62335/nwprts75.
5. I. Kaunang, I. Abdul, A. Maruwae, F. Bumulo, and A. Bahsoan, "Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Belajar Siswa," *Damhil Educ. J.*, vol. 4, no. 1, p. 29, 2024, doi: 10.37905/dej.v4i1.2477.
6. A. S. Gutama, M. Fedryansyah, and E. Nuriyah, "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar ( Kip ) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Implementation of the Kartu Indonesia Pintar ( Kip ) Based on the Value Basis of Justice in Social Policy," *Penelit. dan Pengabd.*, vol. 2, no. 3, p. 394, 2021.
7. B. G. Dimmera and P. D. P. Purnasari, "Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang," *Sebatik*, vol. 24, no. 2, pp. 307–314, 2020, doi: 10.46984/sebatik.v24i2.1137.
8. A. Baihaqi, "IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI MTsN 3 HSU KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA," *Administraus*, vol. 7, no. (3), pp. 56–63, 2023.
9. T. Harun, "Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Smpn 3 Banjarbaru Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru," *AS-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 6, no. 1, p. 19, 2021, doi: 10.31602/as.v6i1.3858.
10. A. Anggleni, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang," *J. PPS UNISTI*, vol. 1, no. 1, pp. 24–39, 2018, doi: 10.48093/jiask.v1i1.3.
11. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011
12. M. B. Miles and A. M. Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
13. A. Annisa, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (Pip) Di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyusin," *J. Ilm. Adm. Dan Sos.*, vol. 18, no. 1, pp. 40–51, 2023, doi: 10.62128/jiads.v18i1.54.



# REFERENSI

14. Sri Kaidah, “Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Pendidikan Anak Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Pendidikan Anak Pada Keluarga Miskin,” J. Geuthèë Penelit. Multidisiplin, vol. 05, no. 03, pp. 312–320, 2022.
15. A. Hildayanti, A. Parawangi, and Rasdiana, “Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,” Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik, vol. 3, no. 6, pp. 1673–1686, 2022.
16. Nadia Nadia, Fitri Kurnianingsih, and Ramadhani Setiawan, “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023,” Jemb. Huk. Kaji. ilmu Hukum, Sos. dan Adm. Negara, vol. 1, no. 3, pp. 181–194, 2024, doi: 10.62383/jembatan.v1i3.521.
17. I. Hermawan and L. Mursyidah, “Kebijakan Indonesia Pintar Mengubah SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo,” Indones. J. Public Adm. Rev., vol. 1, no. 3, p. 17, 2024, doi: 10.47134/par.v1i3.2836.
18. R. Hafrienda, C. Candradewini, and M. D. E. Munajat, “Efektivitas Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sma Negeri Di Kota Bukittinggi,” JANE - J. Adm. Negara, vol. 14, no. 2, p. 697, 2023, doi: 10.24198/jane.v14i2.45140
19. Romanti, “Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru),” J. Ilm. Publika, vol. 11, no. (1), p. 469, 2023,
20. B. Rahmadhani and N. A. A. Asmara, “Strategi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tingkat SMP Kota Bandung ( SMPN 37 dan 35 Kota Bandung ),” Konf. Nas. Ilmu Adm., no. 1, pp. 244–250, 2021.
21. E. Nainah, U. Jamaludin, and F. A. Bahrudin, “Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar Sebagai Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara (Studi Deskriptif Di Smp Negeri 1 Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang-Banten),” J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit., vol. 12, no. 1, pp. 29–40, 2023, doi: 10.33366/jisip.v12i1.2598.

